



KEMENTERIAN LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

BADAN STRATEGI KEBIJAKAN LUAR NEGERI

VOL. 7 NO. 3 | APRIL - JUNI 2022

POLICY BRIEF

PERTUMBUHAN HIJAU BERKELANJUTAN
BAGI INDONESIA DI FORUM INTERNASIONAL

DEWAN REDAKSI

PENGARAH

KEPALA BSKLN

PENANGGUNG JAWAB

SEKRETARIS BSKLN

PEMIMPIN REDAKTUR

LEONARD F. HUTABARAT

REDAKTUR

1. ANANG F. FIRDAUS
2. GANIS GARNISA
3. RAHMAWATI
4. DIANY AYUDANA

EDITOR

1. JUANG AKBAR
2. DICKY H. PRASASTRA
3. WAHYU KUMORO
4. EDI KAHAYANTO

SEKRETARIAT

1. DARYOTO
2. ROSMALA
3. HENDIKA EKA S.



BADAN STRATEGI KEBIJAKAN LUAR NEGERI
KEMENTERIAN LUAR NEGERI

GEDUNG ROESLAN ABDUL GHANI LANTAI 2
JL. TAMAN PEJAMBON NO. 6 JAKARTA PUSAT, 10110
TELP : (021) 3441508

PERTUMBUHAN HIJAU BERKELANJUTAN BAGI INDONESIA DI FORUM INTERNASIONAL

Executive Summary

Untuk menghadapi tantangan pembangunan dan perubahan iklim, terdapat berbagai konsep yang telah berkembang baik secara multilateral maupun secara unilateral. Indonesia perlu memajukan konsep pertumbuhan hijau berkelanjutan sesuai dengan kondisi Indonesia berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja dan kesepakatan Agenda 2030 dan Persetujuan Paris untuk perubahan iklim. Indonesia terus berperan aktif dan telah menyampaikan komitmen dan berbagai keberhasilan dalam upaya penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dalam kerangka UNFCCC dan hal ini juga tercermin dalam prioritas Presidensi G20 Indonesia khususnya transisi energi.

Indonesia terus mendorong pertumbuhan hijau berkelanjutan di sektor energi dan non-energi, serta mendorong berbagai skema pendanaan, seperti investasi, *blended financing*, hingga *Green Bond*. Beberapa rekomendasi strategi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang dapat dipertimbangkan untuk mencapai pertumbuhan hijau berkelanjutan demi generasi mendatang.

A. Latar Belakang

Berbagai konsep mengenai pembangunan dan ekonomi hijau telah berkembang di berbagai forum internasional dan secara unilateral.

Salah satu konsep pembangunan berkelanjutan yang paling awal dan telah diterima secara luas didasarkan pada *United Nation Brundtland Commission* tahun 1987 yang menyebutkan bahwa pembangunan berkelanjutan adalah “*the human ability to ensure that the current development meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs*”.

Sehubungan dengan pencapaian pem-

angunan hijau berkelanjutan terdapat 3 konsep yang saling berhubungan, yaitu:

1. Ekonomi hijau (*green economy*), melihat perkembangan aktivitas ekonomi dan memberikan pemahaman aktivitas ekonomi masyarakat dan pelaku usaha yang lebih sadar akan dampak lingkungan dari aktivitasnya, serta secara aktif berusaha meminimalisir dan mengelola dampak tersebut.
2. Pembangunan rendah karbon (*low carbon development*), mengarah kepada pengelolaan aktivitas ekonomi, jangka menengah maupun jangka panjang, sebagai bagian dari upaya mitigasi emisi GRK dan adaptasi dampak perubahan iklim.

3. Pertumbuhan hijau (*green growth*), penerapan arah kebijakan dengan mempertimbangkan ekonomi nasional yang masih harus berkembang namun dengan penerapan metode yang berkelanjutan.

The United Nations Environment Programme (UNEP) memaknai ekonomi hijau sebagai ekonomi rendah karbon, efisien sumber daya, dan inklusif secara sosial. Ketiga elemen tersebut merupakan prinsip-prinsip dalam pembangunan berkelanjutan. Penerapan ketiga prinsip tersebut dan bentuk capaiannya sangat bergantung pada kemampuan nasional (*respective national capability*) dan kondisi nasional (*national circumstances*).

Bahkan terdapat berbagai konsep yang dikembangkan secara unilateral, misalnya *EU Green Deal*.

Dengan berbagai konsep tersebut, Indonesia perlu secara jelas menekankan elemen utama dan memajukan pengertian konsep pertumbuhan hijau berkelanjutan bagi Indonesia di forum-forum internasional.

Selain itu, perlu dimengerti peran dan inisiatif Indonesia, serta alternatif pendanaan dan strategi untuk mencapai pertumbuhan hijau berkelanjutan.

B. Konsep Dasar Pertumbuhan Hijau Berkelanjutan

Isu perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan adalah tantangan global yang harus kita hadapi bersama. Isu kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan merupakan tantangan yang terus dihadapi, khususnya negara-negara berkembang. Sedangkan perubahan iklim akan memiliki dampak langsung terhadap masyarakat di bidang ekonomi, sosial dan lingkungan hidup.



Gambar 1. Dampak Perubahan Iklim Terhadap Perekonomian Dalam Negeri

Dalam menghadapi tantangan pembangunan dan perubahan iklim, terdapat beberapa rujukan konsep dasar terkait pembangunan hijau berkelanjutan.

The 2030 Agenda for Sustainable Development menekankan 5 elemen dalam pembangunan berkelanjutan, yaitu:

1. **People.** Komitmen mengakhiri kemiskinan dan kelaparan, serta memastikan setiap individu memperoleh kesetaraan dan martabat dalam pemenuhan kebutuhannya dan hidup dalam lingkungan yang sehat.
2. **Planet.** Komitmen melindungi planet dari degradasi melalui konsumsi, produksi, dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, tanggap menyikapi perubahan iklim untuk mendukung pemenuhan kebutuhan generasi saat ini dan mendatang.
3. **Prosperity.** Komitmen memastikan bahwa setiap individu dapat memiliki kehidupan yang sejahtera, serta memastikan kema-

juan ekonomi, sosial dan teknologi yang selaras dengan alam.

4. **Peace.** Komitmen mewujudkan masyarakat yang damai, adil, inklusif, serta bebas dari rasa takut dan kekerasan, tidak ada pembangunan berkelanjutan tanpa perdamaian dan tidak ada perdamaian tanpa pembangunan berkelanjutan.
5. **Partnership.** Komitmen mengerahkan berbagai sarana yang diperlukan untuk implementasi Agenda 2030 melalui kemitraan global berdasarkan solidaritas global yang fokus pada kelompok paling miskin dan rentan dengan partisipasi seluruh pemangku kepentingan.

Selain itu, Persetujuan Paris menekankan konsep perubahan iklim dalam pembangunan berkelanjutan 5 aspek, yaitu:

1. **Negara**, yaitu berlaku untuk semua negara, termasuk negara berkembang untuk mengurangi emisi gas rumah kaca.
2. **Hukum**, yaitu tidak *legally binding* dan berupa komitmen negara atau *Nationally Determined Contribution* (NDC).
3. **Waktu**, dilakukan evaluasi setiap 5 tahun.
4. **Fokus**, menekan kenaikan suhu ke 1,5°C di atas tingkat pra-industrialisasi.
5. **Emisi gas rumah kaca**, pengurangan gas rumah kaca antropogenik.

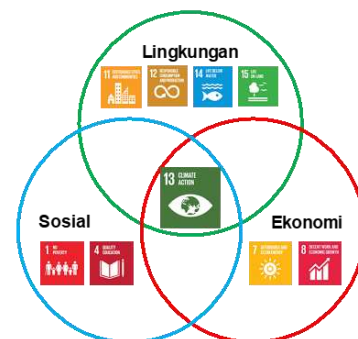
Meskipun Persetujuan Paris tidak secara langsung mengatur tentang pembangunan, namun Persetujuan Paris dimaksudkan untuk memperkuat respon global atas ancaman perubahan iklim dalam konteks pembangunan berkelanjutan dan upaya pengentasan kemiskinan.

Di Indonesia, perencanaan pembangunan nasional yang berkelanjutan, dalam hal ini Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Nasional 2020-2024 (RPJMN 2020-2024) telah tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020. RPJMN ini merupakan RPJMN pertama yang memasukkan aspek lingkungan sebagai Sasaran Makro Pembangunan 2020-2024, yaitu Penurunan Emisi GRK sebesar 27,3% di tahun 2024 menuju target 29% di tahun 2030 sesuai dengan target *Nationally Determined Contribution* (NDC) Indonesia di bawah Persetujuan Paris.

Selain itu, konsep pembangunan berkelanjutan di Indonesia ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 22 menyebutkan bahwa “pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan”.

Berdasarkan hal tersebut, **posisi dasar Indonesia pada diplomasi pembangunan hijau berkelanjutan** adalah peraturan nasional (UU CK) dan kesepakatan multilateral (Agenda 2030 dan Persetujuan Paris) yang telah dinegosiasikan dan disepakati secara multilateral. Sesuai konsep-konsep tersebut, Indonesia menekankan perlunya pendekatan yang



Gambar 2. Keterkaitan 3 Aspek SDGs dalam Pembangunan Berkelanjutan

menyeluruh dan seimbang dengan memperhatikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup.

Karenanya, konsep pertumbuhan hijau berkelanjutan di Indonesia adalah konsep yang berfokus pada ekonomi rakyat berbasis sumber daya alam dengan aktivitas ekonomi yang mengedepankan efisiensi sumber daya, bertanggung jawab terhadap lingkungan, memperbaiki kualitas manusia dan sosial serta mendukung transisi yang berkeadilan dan inklusif.

Bagi Indonesia, pertumbuhan hijau berkelanjutan adalah pertumbuhan yang tidak hanya mencakup pertumbuhan berbasis terestrial (daratan) melainkan juga mencakup pertumbuhan berbasis maritim dan perairan lainnya.

C. Peran Indonesia dalam Pertumbuhan Hijau Berkelanjutan

Indonesia telah menyampaikan dokumen *Updated* NDC dengan proyeksi emisi BAU nasional dan target penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) nasional yang sama dengan yang tertera dalam dokumen *First* NDC. Emisi BAU nasional tahun 2030 diproyeksikan sebesar 2.869 juta tCO₂e dengan kontribusi sektor energi mencapai 58% (setara dengan 1.669 juta tCO₂e), sebagai sektor dengan emisi tertinggi, sedangkan emisi dari sektor berbasis hutan dan lahan atau *forest and other land-use* (FOLU) berkontribusi sebesar 25% (setara dengan 714 juta tCO₂e).

Indonesia juga telah menyampaikan komitmen NDC kepada UNFCCC mengenai komitmennya untuk menurunkan emisi GRK dari level *Business as Usual* (BaU) pada tahun 2030 sebesar 29% melalui upaya nasional dan 41% dengan dukungan internasional.

Dalam dokumen *Indonesia Long-Term Strategy for Low Carbon and Climate Resilience 2050* (Indonesia LTS-LCCR 2050), Pemerintah Indonesia menyampaikan target untuk mencapai kondisi *net sink* di sektor FOLU pada tahun 2030.

Pencapaian target ini akan dicapai dengan berkurangnya deforestasi dan kerusakan lahan gambut yang akan mengemisikan GRK. Selain itu, upaya ini diharapkan dapat pula dicapai dengan adanya peningkatan penyerapan dari penambahan hutan sekunder, kegiatan aforestasi dan kegiatan reforestasi.

TARGET PENURUNAN EMISI INDONESIA	KEHUTANAN	ENERGI & TRANSPORTASI	LIMBAH	PERTANIAN	IPPU
29%	497	314	11	9	2.75
41%	650	398	26	4	3.25

Sumber: NDC Indonesia, KLHK (2018)

Gambar 3. Target Penurunan Emisi per Sektor

Program Pemerintah menuju *Net Zero Emission* (NZE) diterjemahkan dalam Peta Jalan yang memberikan mandat pengembangan energi terbarukan secara masif, inisiatif *retirement* PLTU secara bertahap, serta reduksi emisi karbon melalui pengurangan konsumsi energi fosil.



Gambar 4. Peta Jalan Retirement PLTU Batu Bara Menuju Carbon

Dalam COP26 Glasgow yang berlangsung pada akhir Oktober hingga pertengahan November 2021, Indonesia menyampaikan keberhasilan di sektor kehutanan dan lahan. Indonesia juga memanfaatkan momentum ini

untuk mendapatkan dukungan dan kerja sama internasional untuk melakukan transisi energi menuju energi bersih dan terbarukan.

Capaian di sektor kehutanan dan lahan ini juga menjadi bukti *leading by examples* sebagaimana yang disampaikan Presiden Joko Widodo dalam *World Leaders Summit on Forest and Land Use*. Elemen-elemen penting dalam pidato tersebut termasuk:

1. Komitmen Indonesia untuk menjadi bagian dari solusi dengan target *net carbon sink* sektor kehutanan dan lahan pada tahun 2030.
2. Tingkat kebakaran hutan di Indonesia turun menjadi 82% di tahun 2020, sementara emisi GRK dari hutan dan tata guna lahan ditekan hingga 40,9 persen di tahun 2019 dibandingkan tahun 2015.
3. Deforestasi hutan di Indonesia pada tahun 2020 mencapai tingkat terendah dalam 20 tahun terakhir di saat dunia tahun lalu kehilangan 12 persen lebih banyak hutan primer dibanding tahun sebelumnya, dan ketika banyak negara maju justru mengalami kebakaran hutan dan lahan terbesar sepanjang sejarah.
4. Pentingnya memadukan pertimbangan lingkungan dengan ekonomi dan sosial dalam kebijakan pengelolaan hutan berkelanjutan, termasuk dengan mengutamakan kemitraan dengan masyarakat seperti yang dilaksanakan melalui Program Perhutanan Sosial.
5. Keberhasilan ini dicapai karena Indonesia menempatkan aksi iklim dalam konteks pembangunan yang berkelanjutan.

Dalam Presidensinya pada G20, Indonesia mengangkat 3 isu prioritas, yaitu arsitektur kesehatan global, transisi energi, dan digital ekonomi. Pembahasan mengenai pembangunan hijau berkelanjutan menjadi pokok

bahasan utama dalam *Sherpa Track* dan *Finance Track*, sebagai berikut:

1. Pada ***Sherpa Track***, isu ini dibahas dalam:
 - a. ***Working Group Energy Transitions*** yang membahas tentang *securing energy accessibility; smart and clean technologies scaling-up; advancing energy financing*.
 - b. ***Working Group Environment and Climate*** yang membahas tentang *enhancing land and sea-based actions to support environment protection and climate objectives; enhancing resource mobilization to support environment protection and climate objectives*.
 - c. ***Working Group Development*** yang membahas tentang *coordinating SDGs achievement by the G20*.
 - d. ***Working Group Anti-Corruption*** yang membahas tentang *promoting anti-corruption in the renewable energy*.
2. Pada ***Finance Track***, isu ini dibahas dalam ***Working Group Sustainable Finance***, yaitu mengenai *developing a framework for transition finance, discussing policy levers that incentivize financing and investment towards transition activities*.

D. Inisiatif Pertumbuhan Hijau Berkelanjutan di Indonesia

Indonesia memandang pembangunan hijau berkelanjutan berfokus pada sektor berbasis lahan dan memasukkan unsur ekonomi biru, seperti perikanan dan sumber daya maritim.

Upaya yang dilakukan untuk mendukung pertumbuhan hijau berkelanjutan, antara lain:

1. Sektor Energi:

- a. Transisi menuju sumber daya energi terbarukan; termasuk pengembangan produk bahan bakar nabati, *early re-tirement*, dan manajemen *stranded assets*.
- b. Pengurangan emisi karbon sektor transportasi dan pengembangan ekosistem kendaraan listrik.
- c. Pengembangan *green industrial park* untuk produksi *environmental goods* seperti komponen pembangkit tenaga surya dan sistem penyimpanan energi baterai di dalam negeri.
- d. Pengembangan teknologi *smart grid* untuk efisiensi dan distribusi energi yang merata.

2. Sektor Non-energi:

- a. Peningkatan kualitas sumber daya manusia di sektor pertanian dan perikanan.
- b. Pengembangan sumber daya manusia untuk sektor *green jobs*.
- c. Perbaiki sistem pengelolaan sumber daya alam yang inklusif dan bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat pesisir.
- d. Konservasi hutan hujan dan mangrove di pesisir pantai.

Upaya dalam mendorong pembangunan hijau berkelanjutan tidak hanya melibatkan pemerintah, namun seluruh pemangku kepentingan, seperti BUMN, swasta, dan masyarakat madani, baik pada tingkat nasional dan internasional.

E. Pendanaan untuk Pencapaian Pertumbuhan Hijau Berkelanjutan

Beragamnya kegiatan pembangunan hijau berkelanjutan tentunya memerlukan dukungan pendanaan dan pembiayaan yang beragam tergantung pada karakteristik masing-masing.

Terdapat beberapa skema pendanaan pembangunan hijau berkelanjutan yang terdiri dari:

1. **Skema pendanaan sederhana** berupa kredit usaha rakyat (KUR), kredit ketahanan pangan dan energi (KPP-E), koperasi, jaminan kredit daerah, dan BUMDes bagi UMKM, petani, dan nelayan rakyat.
2. **Skema pendanaan kompleks dan blended financing** berupa pendanaan proyek teknologi hijau dan/atau mendukung pertumbuhan hijau berkelanjutan.
3. **Skema pendanaan investasi** salah satunya adalah platform pembiayaan *SDG Indonesia One* oleh PT SMI untuk lakukan skema derisking. Sedangkan opsi pendanaan investasi lainnya melibatkan lembaga penjaminan.
4. **Skema pendanaan nasional** melibatkan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) berupa dana Pemerintah atau privat. Diharapkan *Indonesia Environment Fund* (IEF) dapat menggalang pembiayaan inovatif, melibatkan sektor swasta (melalui CSR, retribusi), filantropi, dan investasi.
5. **Akses pendanaan internasional** mencakup *Global Environment Facility* (GEF), *Green Climate Fund* (GCF), dan *Adaptation Fund* (AF).

Selain itu, terdapat inovasi pembiayaan pembangunan hijau berkelanjutan, yaitu dengan memperkuat pembiayaan infrastruktur hijau serta pendalaman pasar keuangan syariah melalui *Green Bond/Sukuk Framework*.



Gambar 5. Pembiayaan *Green Sukuk* untuk Pembangunan Hijau Berkelanjutan di Indonesia

F. Kesimpulan dan Rekomendasi

Konsep pembangunan di Indonesia harus sejalan dengan pertumbuhan hijau berkelanjutan. Artinya, pembangunan yang terjadi tidak hanya bertumpu dan berfokus pada kemajuan ekonomi, namun juga harus dapat mendukung kegiatan ekonomi berbasis daratan dan perairan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pada saat bersamaan, pembangunan yang terjadi juga harus menjaga kelestarian lingkungan dan keberlanjutan sumber daya alam sehingga generasi akan memiliki hak yang sama dalam memanfaatkan sumber daya alam dalam proses pembangunannya.

Di samping itu, investasi hijau harus dapat menjamin adanya pengembangan dan alih teknologi, pengembangan dan penguasaan perangkat sistem, serta otoritas/hak pengembangan proyek guna memastikan transisi yang berkeadilan (*just transition*).

Terkait hal tersebut, terdapat beberapa rekomendasi pemetaan yang terbagi dalam 3 prioritas, sebagai berikut:

1. **Prioritas jangka pendek**, mencakup: (i) Kemitraan dalam perdagangan internasional, terutama mengenai *norm-setting* dan keberterimaan standar Indonesia utamanya berbasis *Sustainable Development Goals* (SDGs); (ii) Akses terhadap pendanaan iklim dan akses terhadap *clean technology*; serta (iii) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM).
2. **Prioritas jangka menengah**, mencakup: (i) Edukasi; (ii) Adaptasi terhadap perubahan iklim; mitigasi emisi GRK termasuk transisi energi serta pembangunan rendah karbon di sektor berbasis lahan; (iii) Pemasaran komoditas berbasis lahan dan laut, disertai dengan peningkatan kualitas

produk; (iv) Pemanfaatan potensi sebagai produsen energi terbarukan; pendanaan pembangunan hijau berkelanjutan; serta (v) Modernisasi sistem informasi dan basis data untuk sistem perizinan bagi investasi hijau berkelanjutan.

3. **Prioritas jangka panjang**, mencakup: (i) Membangun Indonesia sebagai hub industri energi terbarukan bagi konsumen internasional; (ii) *Center of excellence* dan hub industri sektor kehutanan, gambut dan berbasis lahan lain, serta produk berbasis laut.

Sumber Kajian

Kajian Kerja Sama “Pertumbuhan Hijau Berkelanjutan bagi Indonesia di Forum Internasional” dapat diakses di: <https://bit.ly/PertumbuhanHijau>.

Daftar Pustaka

- Amalia, A. (2021). Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim di Indonesia pada FGD dengan topik “Transisi dan Transformasi Ekonomi Hijau, Pembangunan Rendah Karbon dan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia”, 20 September
- Lestari, D. (2021). Pendanaan Untuk Pembangunan Berkelanjutan, Rendah Karbon, dan Berketahanan Iklim di Indonesia pada Diskusi Terbatas dengan topik “Aspek Pendanaan dan Pembiayaan dalam Pembangunan dan Ekonomi Hijau”, 24 September.
- Rahmanto, R.B. (2022). Kebijakan Diplomasi Pertumbuhan Hijau Berkelanjutan Indonesia di Forum Internasional. Presentasi pada Forum Komunikasi Kebijakan Luar Negeri (FKKLN), Jakarta, 26 April.